
PROGRAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI DESA WISATA BATU PUTIH KECAMATAN SEKOTONG

Muhammad Jayadi¹, I Made Murana² & Ander Sriwi³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

E-mail: ¹jayadipart043@gmail.com, ²imdmurdana@gmail.com &

³andersamilariti@gmail.com

Article History:

Received: 12-01-2025

Revised: 14-01-2025

Accepted: 15-0-2025

Keywords:

Strategi, Pengembangan,
Pariwisata Berkelanjutan,
Desa Wisata Batu Putih.

Abstract: Desa Wisata Batu Putih di Kecamatan Sekotong Barat, Lombok Barat, memiliki potensi besar dalam bidang pariwisata berkelanjutan berkat kekayaan alam dan budaya lokal yang autentik. Namun, data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir sejak ditetapkan sebagai desa wisata, jumlah kunjungan wisatawan masih sangat sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan merumuskan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Batu Putih. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam tata kelola pariwisata telah terlaksana dengan baik, terutama melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, masih terdapat kendala signifikan seperti aksesibilitas yang belum memadai dan kurangnya promosi yang efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Oleh karena itu, strategi yang diusulkan meliputi peningkatan aksesibilitas, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, serta peningkatan promosi dan kerjasama dengan pihak eksternal. Saran bagi pemerintah desa adalah untuk terus memperbaiki infrastruktur dan memperkuat kemitraan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata Batu Putih.

PENDAHULUAN

Desa Batu Putih merupakan salah satu dari 9 desa yang terletak di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Desa batu putih ditetapkan menjadi desa wisata berdasarkan SK Gubernur Nomor 050.13-366 pada tahun 2019. Desa Wisata Batu Putih ini

mempunyai luas wilayah 12.000 hektar . iklim desa batu putih, sebagaimana desa desa lain di wilayah indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan. Desa batu putih berdasarkan fakta geografis terletak di ujung barat kecamatan sekotong, ujung barat kabupaten lombok barat nusa tenggara barat. Desa batu putih merupakan desa dengan potensi pertanian (agraris) dan pariwisata. Desa batu putih termasuk dalam dua kawasan konservasi darat dan laut yakni taman wisata alam bangko bangko dan taman wisata perairan gita nada

Desa Wisata Batu Putih ini sendiri, memiliki potensi wisata yang sangat memikat. Pantainya yang indah, Desa Wisata Batu Putih memiliki pantai-pantai yang terkenal dengan pasir putihnya yang lembut dan air lautnya yang jernih. Salah satu pantai yang menjadi daya tarik utama adalah Pantai Kepo. Pemandangan alam yang menakjubkan di Pantai Kepo menjadikan pantai ini sebagai destinasi favorit bagi para wisatawan. Keindahan alam yang alami dan mempesona membuat banyak orang tertarik untuk mengunjungi dan menikmati suasana pantai di desa ini.

Pantai Kepo juga menawarkan berbagai aktivitas rekreasi yang menarik. Wisatawan dapat berenang di air laut yang tenang dan bersih, berjemur di bawah sinar matahari yang hangat, atau bermain voli pantai bersama teman dan keluarga. Beragam aktivitas ini menjadikan Pantai Kepo di Desa Wisata Batu Putih sebagai destinasi favorit bagi mereka yang mencari liburan yang santai dan menyenangkan.

LANDASAN TEORI

Dalam artikel strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan di desa wisata batu putih kecamatan sekotong barat.

Menggunakan beberapa konsep serta teori yang kemudian di pergunakan sebagai acuan dalam menjawab rumusan masalah yang telah di tetapkan antara lain:

1. Teori Pengembangan Pariwisata

Pengembangan adalah strategi yang dilakukan guna untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memajukan daya tarik wisata agar jumlah wisatawan mengalami peningkatan sehingga masyarakat dan pemerintah dapat merasakan dampak positifnya (Paturusi, 2001). Menurut Yoeti (2001 dalam Suwarti dan Yuliamir (2017)) menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan mengembangkan suatu produk atau menambah jenis produk wisata tersebut..

Menurut Suwarti dan Yuliamir (2017), menjelaskan bahwa dalam pengembangan pariwisata itu terdapat 3 unsur penting yang dibutuhkan, yaitu:

1. Manusia, adalah sebagai subjek yang utama dalam melaksanakan segala kegiatan pariwisata
2. Tempat, adalah unsur fisik yang menjadi wadah dari segala kegiatan pariwisata.
3. Waktu, adalah berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan seorang wisatawan dalam perjalanan ke tempat wisata tersebut.

Menurut Yoeti (2006), dalam pengembangan sebuah pariwisata itu terdapat 4 prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

1. Keberlangsungan ekologi artinya suatu pengembangan dalam pariwisata dapat menjamin pemeliharaan terhadap wisata tersebut.
2. Keberlangsungan kehidupan dan budaya artinya dengan adanya pengembangan pariwisata membuat peningkatan peran masyarakat dalam kehidupan dan budaya

sehari-hari.

3. Keberlangsungan ekonomi artinya suatu pengembangan pariwisata yang menjamin keberlangsungan kegiatan ekonomi
4. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat artinya memberi wadah kepada mereka untuk mengembangkan pariwisata di daerah tersebut.

Pengembangan suatu pariwisata sangat diperlukannya sebuah perencanaan. Hal ini bertujuan agar pengembangan yang sedang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana di awal dan dapat mencapai sasaran yang diinginkan. Alasan utama dilakukannya sebuah pengembangan pariwisata ini untuk meningkatkan perekonomian daerah atau negara tersebut (Santi, 2010). 2.2 Strategi Pengembangan Pariwisata Strategi pengembangan pariwisata adalah hal yang dilakukan agar wisata yang ada menjadi berkembang lebih baik lagi kedepannya.

Ketersedian fasilitasfasilitas yang lengkap dan menunjang perkembangan pariwisata. Menurut Suwanto (2004), untuk strategi dalam pengembangan pariwisata terdiri dari :

1. Pemasaran/Promosi adalah hal yang dilakukan guna untuk memperkenalkan, memberitahu masyarakat banyak mengenai destinasi wisata pada suatu daerah tersebut.
2. Aksesibilitas adalah keadaan jalan yang akan dilalui oleh para pengunjung saat menuju tempat wisata . Ketersedian akses jalan yang baik dan lancar akan membuat banyak para wisatawan tertarik untuk berkunjung.
3. Kawasan pariwisata adalah suatu tempat wisata yang harus dikembangkan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, seperti penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Hal ini berguna untuk sebagai penunjang tempat wisata tersebut.
4. Jenis destinasi wisata adalah jenis-jenis wisata yang ada di daerah tersebut, contohnya: pegunungan, pantai, budaya, maupun religi.
5. Produk dari wisata adalah segala hal yang ditawarkan dari wisata tersebut. Baik dari segi fasilitas yang disediakan maupun sarana dan prasarana penunjang lainnya.
6. Sumber daya manusia adalah subjek yang sangat penting dalam melakukan pengembangan pariwisata. Sumber daya manusia yang membentuk kelompok dengan tujuan untuk pengembangan pariwisata disebut kelompok sadar wisata.
7. Kampanye nasional sadar wisata adalah suatu hal yang dilakukan dan dijalankan dengan tujuan untuk memberikan penegasan disiplin terkait kegiatan kepariwisataan, dan setiap pemerintah daerah biasanya telah membentuk suatu kelompok sadar wisata yang anggota kelompok adalah masyarakat sekitar tempat wisata tersebut.

Berdasarkan hasil dari rapat Koordinator Pemerintah Pusat dan Daerah yang dilakukan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), menjelaskan bahwa ada 6 strategi pengembangan pariwisata yang bisa diterapkan, yaitu: 1. Mempercepat penyelesaian infrastruktur. 2. Mendorong pengembangan atraksi wisata. 3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana. 4. Meningkatkan dan memperkuat promosi wisata. 5. Mendorong masyarakat untuk bersedia berinvestasi. 6. Menyusun standar prosedur manajemen pariwisata.

Daya Tarik Wisata

Definisi Daya Tarik Wisata Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009, daya tarik adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi

sasaran atau kunjungan wisatawan. Pengembangan daya tarik wisata tergantung dengan kegiatan yang direncanakan untuk berkembang. Kegiatan yang akan dilakukan itu akan tergantung pada kondisi dan potensi di daerah, sistem pengelolaan di wisata daerah tersebut, sehingga untuk daya tarik wisata ini akan tergantung dari kondisi destinasi pariwisata tersebut.

Jenis Daya Tarik Wisata

Menurut Mappi (2001) dalam Pradikta (2013), daya tarik wisata dibagi menjadi 3 yaitu: 1. Daya Tarik Wisata Alam Adalah sumber daya alam yang memiliki potensi dan daya tarik wisata. Potensi wisata alam dibagi dalam 4 kawasan yaitu: flora fauna, keunikan dan kekhasan ekosistem seperti laut, pantai, gunung (berapi), danau, sungai, fauna (langka), kawasan lindung, cagar alam pemandangan alam, air terjun, dan lainnya. 2. Daya Tarik Wisata Budaya Adalah suatu daya tarik wisata yang memperlihatkan ke kekhasan daerah suatu destinasi contohnya: tari-tari (tradisional), musik (tradisional), upacara adat, cagar budaya, museum, adat istiadat lokal, dan lainnya. 3. Daya Tarik Wisata Buatan Adalah suatu daya tarik yang muncul dari hasil karya manusia yang nantinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan, contohnya: sarana dan fasilitas olahraga, hiburan (sulap, akrobat), ketangkasan (naik kuda), taman rekreasi, taman nasional, pusat perbelanjaan, dan lainnya.

1. Atraksi (attraction)

Atraksi (attraction) merupakan suatu produk wisata dari sebuah tempat wisata. Atraksi terbagi menjadi 3 jenis, yaitu atraksi wisata alam seperti: air terjun, pantai, perkebunan, bukit, gunung, sungai, dan lainnya. Atraksi wisata budaya seperti: kesenian atau kerajinan tangan, kuliner atau masakan khas, kearifan lokal, bangunan sejarah. Atraksi wisata buatan seperti pameran, wisata olahraga, taman bermain, festival dan konferensi (Suwena, 2010). Suatu atraksi wisata di suatu daerah wisata dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat wisata.

Menurut Suwanto (1997), standar minimal dari atraksi/daya tarik wisata itu adalah: a. Terdapat daya tarik wisata yaitu daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan daya tarik wisata buatan. b. Terdapat lingkungan yang memberikan rasa senang, indah, nyaman dan bersih. c. Memiliki aksesibilitas yang baik dan mudah dijangkau. d. Terdapat ciri khas tersendiri e. Terdapat sarana dan prasarana penunjang pariwisata. f. Wisata alam memiliki daya tarik karena keindahan alam, pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan lainnya. g. Wisata budaya memiliki daya tarik karena terdapat nilai khusus seperti kesenian, upacara-upacara adat, kerajinan dan lainnya. 38 h. Adanya pendanaan untuk pembangunan daya tarik wisata.

2. Aksesibilitas (accessibilities)

Aksesibilitas (accessibilities) merupakan sarana dan infrastruktur yang memudahkan wisatawan berkunjung ke desa wisata, diantaranya berupa akses jalan raya (kondisi jalan dan alternatif jalan), jenis transportasi yang bisa digunakan dan rambu-rambu penunjuk jalan. Menurut Panduan Desa Wisata (2021), standar minimal dari aksesibilitas suatu desa wisata itu terdiri dari: a. Memiliki jalan penghubung yang berkondisi baik. b. Peningkatan jalan desa agar aman untuk para pejalan kaki. c.

Kemudahan akses untuk penyandang disabilitas/difabel. d. Memiliki kemudahan dalam layanan dan informasi serta promosi. e. Memiliki akses jalan yang aman dan memadai. f. Terdapat moda transportasi lokal yang nyaman dan menghubungkan akses masuk g. Terdapat penanda dan penunjuk arah.

3. Amenitas (amenities)

Amenitas (amenities) adalah ketersediaan sarana dan prasarana pariwisata di suatu daerah wisata. Sarana seperti akomodasi untuk tempat penginapan, terdapatnya warung/rumah makan, transportasi, agen perjalanan, gedung pertunjukan, tempat peribadatan, sarana pendidikan, sarana olahraga, sarana kesehatan, keamanan, parkir dan lainnya. Prasarana tersebut terdiri dari jalan, air bersih, listrik, TPU, telekomunikasi, dan lainnya.

Menurut Panduan Desa Wisata (2021), suatu desa wisata untuk ketersediaan amenities (sarana dan prasarana) memiliki standar minimal yaitu:

- a) Terdapat kualitas lingkungan desa wisata yang dapat mendukung kegiatan kepariwisataan.
- b) Terdapat rumah masyarakat yang dijadikan untuk homestay.
- c) Terdapatnya bangunan yang digunakan sebagai sarana pariwisata.
- d) Terdapat toilet yang memadai
- e) Adanya pasar tradisional yang nyaman. f. Adanya penanda dan penunjuk arah g. Tersedianya tempat parkir yang memadai

4. Pelayanan Tambahan (ancillary)

Pelayanan tambahan (ancillary) adalah suatu pelengkap dalam menjalankan kegiatan pariwisata yang disediakan untuk wisatawan maupun pelaku wisata. Organisasi/kelembagaan pendukung ini juga disebut dengan pelayanan tambahan pariwisata yang mana tentang organisasi yang terlibat dalam pengembangan dan pemasaran sebuah wisata maupun desa wisata.

Organisasi/lembaga pendukung pengembangan desa wisata adalah lembaga yang terlibat dalam pengembangan suatu desa wisata. Organisasi tersebut seperti Dinas Pariwisata, kelompok sadar wisata/pokdarwis setempat, organisasi perangkat daerah, dan asosiasi kepariwisataan contohnya agen travel/biro perjalanan wisata. Kelembagaan pendukung yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata yaitu organisasi perangkat daerah (OPD), kelompok sadar wisata (pokdarwis), koperasi dan BUMDes (Berdasarkan panduan desa wisata, 2021). Pelayanan tambahan selain organisasi/kelembagaan dalam pelayanan tambahan tersedia juga pemasaran atau informasi dan promosi terkait suatu wisata atau desa wisata.

Promosi wisata adalah kegiatan memasarkan atau memberikan informasi terkait suatu tempat wisata atau desa wisata ke kalangan masyarakat luar, dengan tujuan dapat dikenal, dan banyak yang berkunjung ke tempat tersebut. Penelitian kali ini, untuk pelayanan tambahan nya yang dilihat adalah organisasi/lembaga pendukung pengembangan desa wisata, dan informasi dan promosi desa wisata. Standar minimal dari suatu organisasi/lembaga pendukung pengembangan wisata menurut Arida & Pujian (2017) setelah dimodifikasi terdiri dari: 1. Memiliki struktur dan perangkat desa yang bekerja efektif 2. Badan pengelola/organisasi perangkat daerah bekerja efektif 3. Terdapat kelembagaan dalam suatu desa yang dapat mendukung pengembangan desa.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Denzim dan Lincoln dalam Moleong (2011: 5), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berfokus pada situasi alami dengan tujuan menafsirkan

fenomena yang terjadi, menggunakan berbagai metode yang relevan. Nana Syaodih Sukmadinata (2009: 64) juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran baik secara individu maupun kelompok.

Sementara itu, Nurul Zuriah (2007: 47) mengungkapkan bahwa pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat tentang gejala, fakta, atau kejadian tertentu dalam populasi atau wilayah tertentu. Penelitian deskriptif tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan keadaan suatu variabel, gejala, atau situasi apa adanya.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah penelitian meliputi:

a) Pra Penelitian

Sebelum memulai penelitian, beberapa persiapan perlu dilakukan. Peneliti harus menyiapkan alat pengumpulan data seperti buku catatan, alat perekam, kamera, dan ponsel. Selanjutnya, peneliti menentukan tujuan penelitian dan memilih topik yang relevan, misalnya destinasi wisata, industri, pemasaran, atau aspek kelembagaan. Peneliti juga harus memilih metode penelitian yang akan digunakan, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Setelah itu, peneliti menetapkan informan dan sampel serta menyusun pertanyaan-pertanyaan untuk pengumpulan data.

b) Saat Penelitian

Selama penelitian, peneliti aktif melakukan observasi, wawancara, dan mendokumentasikan temuan. Data yang dikumpulkan dari kegiatan ini dihimpun dengan hati-hati untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang diperoleh.

c) Pasca Penelitian

Setelah data terkumpul, peneliti memasuki tahap pasca penelitian. Data mentah dianalisis dan diuji dengan cermat. Peneliti kemudian merangkum atau memfokuskan perhatian pada data yang dianggap penting. Data yang telah direduksi disajikan secara jelas dan sistematis. Akhirnya, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, penelitian dapat dilakukan secara sistematis dan menghasilkan hasil yang valid dan bermakna.

Lokasi Penelitian

di Desa Wisata Batu Putih, dengan objek penelitian adalah karena memiliki potensi lokal yang dapat menjadi daya tarik wisatawan. Lokasi penelitian adalah Desa Wisata Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, yang kaya akan potensi wisata namun belum dimanfaatkan secara optimal. Peneliti memilih lokasi ini karena dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga memudahkan pengumpulan data.

Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, seperti memilih individu yang dianggap paling mengetahui hal yang diharapkan (Sugiyono, 2009). Peneliti merasa bahwa sampel yang dipilih paling memahami masalah yang akan diteliti. Tujuan penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini adalah untuk memahami kondisi Desa Wisata Batu Putih. Informan yang dipilih adalah:

Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun)

Data yang dikumpulkan dari Kepala Desa mencakup informasi mengenai peran

pemerintah desa, kebijakan dan dukungan yang diberikan, kerjasama dengan Pokdarwis, komunikasi, alokasi dana dan anggaran, serta sejarah penetapan Desa Batu Putih sebagai desa wisata. Selain itu, dokumen profil desa dan sejarah pembentukan Kelompok Sadar Wisata juga akan disertakan.

Ketua Karang Taruna Desa (Ketua Kelompok Sadar Wisata Sebelumnya)

Dari ketua Pokdarwis sebelumnya, data yang diperoleh meliputi tujuan dan visi kelompok, partisipasi anggota, program edukasi, keterampilan komunikasi, kolaborasi dengan pemerintah desa, serta struktur organisasi dan informasi mengenai potensi daya tarik wisata di Desa Wisata Batu Putih.

Ketua Pokdarwis yang Baru

Data yang dikumpulkan dari ketua Pokdarwis yang baru mencakup harapan ke depan, termasuk tujuan dan visi, partisipasi anggota, program edukasi, serta komunikasi dengan pemerintah desa dan masyarakat.

Tokoh Pemuda

Data yang dikumpulkan dari tokoh pemuda mencakup informasi mengenai pengetahuan dan kesadaran mereka, partisipasi masyarakat, hubungan dengan Kelompok Sadar Wisata, serta keterlibatan masyarakat, terutama para pemuda.

Tokoh Masyarakat (Ketua Lembaga Adat)

Data yang diperoleh dari tokoh masyarakat mencakup informasi tentang daya tarik wisata budaya seperti Makam Sile Denden dan kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa Wisata Batu Putih.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Observasi

1. Kondisi Infrastruktur

Observasi lapangan di Desa Wisata Batu Putih menunjukkan bahwa infrastruktur yang mendukung sektor pariwisata masih dalam kondisi yang kurang memadai. Jalur akses utama menuju desa teridentifikasi memiliki kualitas jalan yang buruk, dengan sejumlah kerusakan seperti lubang dan permukaan yang tidak rata.

2. Kesadaran Masyarakat

Hasil observasi mengungkapkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat lokal mengenai prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan masih tergolong rendah. Banyak anggota komunitas tidak sepenuhnya memahami konsep dan manfaat dari pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

3. Dukungan Pemerintah dan Sektor Swasta

Observasi menunjukkan bahwa dukungan dari pemerintah lokal dan sektor swasta terhadap pengembangan pariwisata di Desa Batu Putih masih terbatas.

4. Potensi Wisata

Desa Batu Putih memiliki potensi wisata yang signifikan, termasuk keindahan alam yang masih terjaga serta kekayaan budaya lokal.

5. Partisipasi Komunitas

Tingkat partisipasi komunitas dalam pengembangan pariwisata di Desa Batu Putih masih relatif rendah.

1. Perencanaan

Pengembangan pariwisata merupakan suatu kegiatan yang berbasis kepada

masyarakat ataupun komunitas dengan sumber daya manusia dan keunikan lokal baik itu fisik maupun nonfisik sebagai faktor utama dalam penggerak suatu pariwisata.

2. Pengorganisasian

Kepariwisata berbasis masyarakat dijadikan sebagai peluang dan potensi besar dalam pengembangan kualitas hidup masyarakat. Peran organisasi dalam pengembangan pariwisata sangatlah penting khususnya dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di desa batu putih.

3. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengembangan objek wisata, pelaksanaan dilakukan agar dalam proses pengembangan tertuju pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

4. Pengendalian

Pengendalian yang meliputi proses pengawasan merupakan usaha dalam menilai guna mengetahui kenyataan yang telah diperoleh dengan membandingkan proses pelaksanaan program kerja dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dibuatkan perbaikan dari hasil pemantauan yang telah dilakukan.

Pembahasan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang program pengembangan pariwisata berkelanjutan di desa batu putih kecamatan sekotong barat, maka peneliti menemukan hal-hal sebagai berikut:

4.3.1 Perencanaan

Berdasarkan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan dalam undang-undang no. 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan mengandung poin memberikan manfaat terhadap kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan terhadap masyarakat serta mampu memberdayakan masyarakat.

4.3.3. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan proses penentuan kerja dan pengaturan aktivitas yang akan dilakukan dalam kegiatan pencapaian tujuan dengan menempatkan individu tertentu pada tugas-tugas operasional serta memanfaatkan sumber daya manusia dengan memberikan tanggung jawab kerja yang diberikan secara relatif dalam melakukan aktivitas dalam pencapaian tujuan (hasibuan 2005: 127).

4.3.4 Pelaksanaan

Dalam penelitian ini proses pelaksanaan meliputi proses pengorganisasian dan pengarahan. Telah dijelaskan sebelumnya bagaimana proses pengorganisasian yang terjadi dalam pengelolaan objek wisata pariwisata berkelanjutan di desa batu putih. Pengarahan sendiri dilakukan dengan mengingatkan petugas bagaimana dalam melakukan tugas-tugas operasionalnya.

4.3.5. Pengendalian

Pengendalian yang meliputi proses pengawasan merupakan usaha dalam menilai guna mengetahui kenyataan yang telah diperoleh dengan membandingkan proses pelaksanaan program kerja dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dibuatkan perbaikan dari hasil pemantauan yang telah dilakukan.

4.3.6 Pengembangan Wisata Pantai Kepo Melalui Konsep 4A

Pengembangan pariwisata merupakan rangkaian proses yang berkesinambungan dengan memadukan potensi dan keunggulan suatu daerah untuk dapat menghasilkan produk wisata yang berkualitas melalui perencanaan yang lebih baik (Herman, 2017).

KESIMPULAN

1. Kendala utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Desa Wisata Batu Putih, meliputi infrastruktur yang belum memadai, seperti jalan dan fasilitas sanitasi, yang menghambat perkembangan sektor pariwisata. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, terlihat dari kekurangan pelatihan dan rendahnya partisipasi masyarakat lokal dalam manajemen pariwisata, juga menjadi faktor penghambat.
2. Program pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu diterapkan. perbaiki jalan dan fasilitas sanitasi yang ramah lingkungan, diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Pelatihan intensif bagi masyarakat lokal dalam manajemen pariwisata dan pengelolaan lingkungan perlu dilakukan untuk memperkuat kapasitas mereka.

SARAN

1. Pertama, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur pariwisata, seperti pembenahan jalan dan fasilitas umum lainnya yang dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi pengunjung.
2. Kedua, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengembangkan program pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat setempat, khususnya dalam manajemen lingkungan dan promosi budaya lokal. Kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku industri pariwisata sangat dianjurkan untuk mencapai tujuan ini. Ketiga, perlu diperkuat regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah dari aktivitas pariwisata. Implementasi sistem manajemen limbah yang efektif dan edukasi bagi para pelaku industri pariwisata tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan merupakan langkah krusial dalam memastikan keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] *Andrea, B., & Janet, M. (2012). Introduction to Sustainable Tourism. New York: Green Leaf Publishing.*
- [2] *Baiquni, M. (2005). Pariwisata Berkelanjutan: Peran Lokal dalam Global. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada. Bappeda Kabupaten Lombok Barat. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2020-2025. Lombok Barat: Bappeda.*
- [3] *Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2020). Laporan Tahunan 2020. Mataram: Dispar NTB.*
- [4] *Hajdas, M. (2006). Dalam Birin, R. (2010). Pengelolaan Destinasi Wisata Berkelanjutan. Bandung: Pustaka Ilmu.*
- [5] *Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020). Panduan Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta: Kemenparekraf.*
- [6] *Nguyen Van Hoang, P. (2020). PROGRAM Pengelolaan Pariwisata di Asia Tenggara. Hanoi: Penerbit Universitas Hanoi.*
- [7] *Nguyen Van Hoang, P. (2020). PROGRAM Pengelolaan Pariwisata di Asia Tenggara. Hanoi: Penerbit Universitas Hanoi.*
- [8] *Nuryanti, W. (1993). Tourism and Cultural Development in Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.*
- [9] *Rodriguez, M. (2020). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta: Penerbit Ilmu.*
- [10] *Rodriguez, M. (2020). Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Jakarta: Penerbit Ilmu.*
- [11] *Schmidt, A. (2020). Sustainable Tourism Development. Berlin: Green Future Publishing.*
- [12] *Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.*
- [13] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.*
- [14] *UNEP. (2005). Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy*
- [15] *Makers. Paris: United Nations Environment Programme.*
- [16] *UNESCO. (2002). Cultural Heritage and Sustainable Tourism. Paris: UNESCO Publishing.*
- [17] *United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2020). Rencana PROGRAMs Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs untuk Indonesia. Madrid: UNWTO.*